

KEBIJAKAN HAMBATAN EKSPOR BIJI KAKAO INDONESIA TAHUN 2010

Oleh : Tedisah Shoni

Email : Tedisah.shoni2469@student.unri.ac.id

Pembimbing : Ahmad Jamaan. S.IP., M.Si.

Email : ahmad.jamaan@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru – Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research analyzes the policy issues set by the Republic of Indonesia regarding Barriers to Cocoa Bean Exports as a step to channel domestic cocoa beans to national cocoa processing factories. Indonesia, as a cocoa bean producing country, exports cocoa beans from its plantations to various continents throughout the world. The government plans to limit exports of Indonesian cocoa beans because it would be more profitable if Indonesia developed its own cocoa processing factory so that later, what was originally exporting cocoa beans could become a country that exports processed cocoa which has a higher price value than cocoa beans which are only raw materials.

This research uses neo-mercantilism theory at the nation-state level of analysis. This research uses qualitative methods and data collection techniques carried out through books, journals, websites and articles.

Through this research, the conclusion was obtained that the Republic of Indonesia Policy Regarding Barriers to Cocoa Bean Exports has had a positive impact on the profits and development of Indonesian cocoa trade in the international market. Some of the benefits obtained from this policy include: New job opportunities have opened up in the country due to the growing cocoa processing industry. Considerable added value has been obtained from processed cocoa exports since Indonesia implemented a policy of restricting cocoa bean exports.

Keywords : *cocoa, exports, Indonesia, policy, world.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini menjelaskan tentang awal mula diberlakukannya kebijakan hambatan ekspor biji kakao ke pasar dunia dengan alasan untuk meningkatkan hilirisasi produk kakao nasional. Sebagai salah satu negara yang membudidayakan tanaman kakao, Indonesia melaksanakan perdagangan internasional berupa mengekspor produk kakao ke mancanegara. Perlu kita ketahui Indonesia ialah yang terbesar keenam sebagai negara penghasil biji kakao di dunia. Namun,

dari sekian banyak kakao yang dihasilkan mayoritas produk kakao yang diekspor adalah bahan mentah alias biji kakao saja. Hal tersebut menyebabkan kelangkaan bahan mentah bagi industri hilir kakao nasional.

Sebagai langkah untuk menyikapi fenomena tersebut, pada tanggal 23 Maret tahun 2010 pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menghambat ekspor biji kakao yang akan mulai diberlakukan pada awal april 2010. Kebijakan hambatan ekspor tersebut dimuat dalam Peraturan Menteri

Keuangan nomor 67/PMK.011/2010 tentang penetapan produk ekspor yang dikenakan bea keluar dan pemberian tarif bea keluar.¹ Dalam peraturan tersebut ditetapkan beberapa barang yang dikenakan tarif bea keluar dan salah satunya adalah biji kakao.

Penetapan kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan serta penolakan dalam dunia perkakaoan di Indonesia khususnya dalam lingkup masyarakat selaku petani kakao dan pelaku ekspor biji kakao. Namun disamping penolakan yang terjadi, terdapat juga pihak-pihak yang memberikan dukungan dan setuju dengan ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai bea keluar untuk biji kakao tersebut.

Hasil dari pemberlakuan kebijakan tersebut secara perlahan menutup keinginan para pelaku ekspor untuk mengekspor biji kakao karena adanya tarif yang harus dikeluarkan sebagai biaya ekspor tambahan.² Arus perdagangan biji kakao pun jadi berubah, karena mau tidak mau pelaku ekspor dipaksa untuk mengalihkan target pasarnya ke dalam negeri. Pada akhirnya para pelaku ekspor menjual biji kakao nya ke dalam negeri yang menjadi pemicu awal bagi perkembangan industri hilir kakao nasional.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan teori neo merkantilisme dikarenakan di dalam penelitian ini, inti pembahasannya mengenai peningkatan volume ekspor dan taraf produk serta kualitas produk yang akan diekspor. Dalam hal ini produk yang dimaksud adalah kakao. Neo merkantilisme sendiri masih memiliki asumsi dasar yang tetap sama

dengan merkantilisme akan tetapi ada sedikit perbedaan dalam segi praktiknya.³ Dengan teori neo-merkantilisme pemerintah Indonesia berkeyakinan dapat memantapkan perdagangan kakao global nya dengan menetapkan kebijakan hambatan ekspor biji kakao agar negara memiliki pasokan biji kakao yang memadai untuk kemudian diolah sehingga mendapatkan produk baru dengan taraf dan kualitas yang lebih baik dari hasil olahan biji kakao tersebut yang kemudian akan diekspor ke dunia. Dengan demikian nilai yang didapatkan dari hasil ekspor produk kakao tersebut akan lebih besar dari sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan level analisis negara-bangsa dimana asumsi dasar dari level analisis ini pembahasannya berpusat pada pembuat keputusan. Level analisis negara bangsa kajiannya mengacu terhadap kebijakan yang dibuat oleh suatu negara sebagai aktor dominan yang mengatur hubungan antarnegara. Penelitian ini menggunakan level analisis negara bangsa karena fokus penelitian ini adalah membahas aktor negara yakni Indonesia sebagai negara eksportir kakao.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditulis dengan metode penelitian kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang didapat sebagai acuan dari penelitian ini dikumpulkan dari beberapa literatur dan menggabungkan data yang bersumber dari penelitian terdahulu, jurnal, makalah, artikel dan internet.

¹ Kemenkeu, "Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar" <http://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/67~PMK.011~2010Per.htm> Diakses pada 20/07/2020 pukul 04:34 wib

² Zulfiandri, "Analisis Situasi Industri Hilir Kakao Pasca Pengenaan Pajak Ekspor Kakao Sepanjang Tahun 2013-2017," *Jurnal Inovisi* 14, no. 2 (2018): 81–92.

³ Putri larasati, "Merkantilisme dalam Ekonomi Politik Internasional" https://www.academia.edu/36788697/Merkantilisme_dalam_Ekonomi_Politik_Internasional diakses pada 7/12/2023 pukul 7:43 WIB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sehubungan dengan terus menerus berkurangnya pasokan yang dibutuhkan oleh para pelaku Industri pengolahan kakao akibat dari kelangkaan yang terjadi karena biji kakao hasil perkebunan nasional tidak dijual ke dalam negeri melainkan diekspor ke luar negeri padahal dari segi produk akan memberikan keuntungan tambahan bagi negara jika kakao yang diekspor merupakan kakao yang sudah jadi.

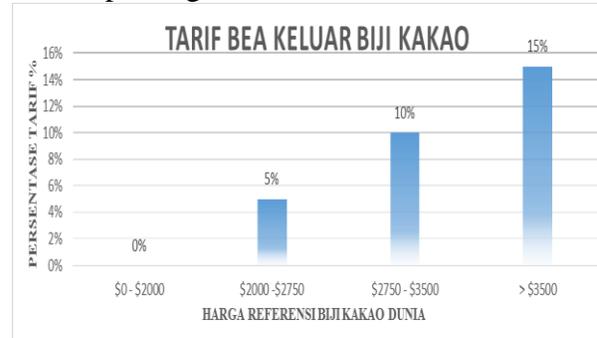
Menyikapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan hambatan ekspor biji kakao yang ditujukan ke seluruh pasar Internasional tanpa terkecuali dengan memberikan pajak ekspor kepada para eksportir yang ingin mengekspor biji kakao. Kebijakan pengenaan pajak ekspor tersebut dinamai dengan kebijakan bea keluar. Bea keluar merupakan pungutan yang dilakukan negara mengacu pada undang-undang yang ditujukan terhadap barang ekspor tentang hal yang berhubungan dengan kepabeanan.⁴ Dalam hal ini kebijakan bea keluar yang dimaksud yakni yang ditujukan untuk beberapa barang ekspor yang salah satunya adalah biji kakao.

Kebijakan Hambatan Ekspor Biji Kakao

Kebijakan hambatan ekspor biji kakao memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sektor perkebunan di Indonesia. Kebijakan hambatan ekspor biji kakao atau yang dikenal dengan kebijakan bea keluar, pertama kali dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 dimana didalamnya mengatur barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. ketentuan hambatan ekspor untuk biji kakao dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut yaitu tarif pengenaan bea keluar yang progresif

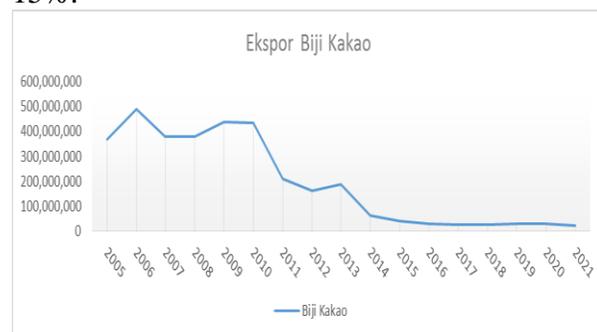
⁴ Kemenkeu, "Penaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor" <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/55TAHUN2008PP.htm> diakses pada 30/03/2023 pukul 17:10 WIB.

menyesuaikan dengan harga referensi dari biji kakao global. Besaran tarif bea keluar yang akan dikenakan kepada ekspor biji kakao diatur dalam ketentuan persentase tarif secara bertahap sebagai berikut.



Sumber : Kementerian Keuangan, 2010

Penetapan tarif bea keluar dikelompokkan atas ketentuan yang sudah ada dan mengacu kepada kurs harga biji kakao internasional atau harga referensi.⁵ Biji kakao dikenakan tarif bea keluar 0% jika harga referensinya hanya 2,000 USD per ton. Jika harga referensi lebih dari 2,000 USD sampai dengan 2,750 USD tarif bea keluar yang dikenakan yakni sebesar 5%. Untuk tarif bea keluar sebesar 10% dikenakan jika harga referensi berkisar dari 2,750 USD sampai 3,500 USD. Jika harga referensi lebih dari 3,500 USD tarif bea keluarnya yakni sebesar 15%.



Sumber : Comtradeplus.un.org

⁵ Rudi Hermawan, "Analisis pengaruh kebijakan bea keluar biji kakao, impor biji kakao, ekspor biji kakao dan harga cocoa butter terhadap ekspor cocoa butter," *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4.3 (2019), 233-42 .

Dipaparkan secara jelas dalam grafik bahwa kebijakan bea keluar yang menetapkan tarif ekspor untuk biji kakao menurunkan tingkat ekspor biji kakao Indonesia secara signifikan dan bertahap per tahun setelah kebijakan diberlakukan. Dengan demikian kebijakan penetapan tarif atau hambatan ekspor biji kakao yang disebut sebagai kebijakan bea keluar memunculkan pengaruh seperti yang diharapkan yakni penurunan ekspor biji kakao sehingga nantinya biji kakao dapat diolah sendiri oleh industri hilir dalam negeri dan menghasilkan produk yang lebih tinggi nilainya dari biji mentah kakao.

Hilirisasi Kakao Pasca Kebijakan BK

Kebijakan bea keluar menyebabkan terjadinya kebangkitan pabrik-pabrik pengolahan kakao yang sebelumnya berhenti beroperasi akibat kekurangan bahan baku. Fenomena kebangkitan pabrik-pabrik industri pengolahan kakao adalah bentuk awal tercapainya tujuan yang digalakkan oleh pemerintah melalui penetapan kebijakan bea keluar yakni perolehan nilai tambah dari produk kakao dalam negeri. Pencapaian nilai tambah produk kakao harus dimulai dengan mengubah arus perdagangan internasional kakao dari yang semula mengekspor biji mentah menjadi ekspor hasil olahan. Langkah yang diambil pemerintah dengan menciptakan kebijakan hambatan ekspor biji mentah melalui penerapan kebijakan BK berhasil menciptakan *progress* yang ditandai dengan kembali munculnya pabrik-pabrik kakao yang sempat tutup usaha.

Pabrik-pabrik tersebut diantaranya ialah PT Effem Indonesia yang berlokasi di Makassar dengan kapasitas produksi 17.000 ton per tahun, PT Jaya Makmur Hasta yang berlokasi di Tangerang dengan kapasitas produksi mencapai 15.000 ton per tahunnya, PT Unicom Kakao Makmur Sulawesi yang berlokasi di Makassar dengan kapasitas produksi 10.000 ton per tahun, lalu PT Davomas Abadi yang berada di Tangerang

dengan kapasitas produksi sebesar 40.000 ton per tahun dan PT Maju Bersama Cocoa Industries bertempat di Makassar dengan kapasitas 20.000 ton per tahun.⁶ Dibalik kapasitas produksi industri yang meningkat dan pabrik-pabrik pengolahan kakao yang beroperasi kembali, peran tenaga kerja merupakan salah satu aspek utama dalam mendorong kemajuan perindustrian kakao yang baru saja mulai berkembang kembali. Perkembangan hilirisasi kakao berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja baru yang sangat dibutuhkan dalam menunjang keberlangsungan produksi di tiap-tiap pabrik kakao yang beroperasi.⁷ Oleh karena itu, kebijakan BK merupakan langkah awal yang akan menjadikan perekonomian Indonesia meningkat melalui produksi kakao olahan.

Ekspor Kakao Olahan Pasca Kebijakan BK

Kebijakan Bea keluar telah berhasil memicu peningkatan produktivitas industri hilir kakao. Pabrik-pabrik pengolahan kakao yang menghasilkan produk olahan kakao semakin terlihat membaik setiap tahunnya serta ekspor kakao olahan juga semakin mengalami peningkatan. Produk kakao yang sudah jadi dan berhasil ditingkatkan produksinya oleh pengusaha hilir kakao dalam negeri diantaranya yakni *Cocoa powder*, *cocoa butter*, *cocoa paste* dan *chocolate*. Jenis dari olahan kakao tersebut masing-masing mengalami peningkatan produksi yang tentunya menyebabkan ekspor dari produk-produk olahan tersebut ikut mengalami peningkatan.

⁶ Media Industri, 2013. *Genjot Industri Pengolahan Kakao*. no 2, 2013.

⁷ Sebastian Hadinata dan Maria Merry Marianti, "Analisis Dampak Hilirisasi Industri Kakao di Indonesia," *Jurnal Akuntansi Maranatha* 12, no. 1 (2020): 99–108.

Volume Ekspor Kakao Olahan Indonesia Ke Dunia (Ribu Ton)					
Tahun	Kakao Bubuk	Kakao Butter	Kakao Pasta	Coklat	Total
2005	27,670	40,387	42,890	7,911	118,858
2006	34,096	49,503	47,404	10,103	141,106
2007	32,325	51,148	42,291	16,280	142,044
2008	34,512	55,584	58,665	12,813	161,574
2009	27,597	41,605	25,147	12,243	106,592
2010	36,454	46,687	33,775	16,159	133,075
2011	41,837	82,535	98,306	16,519	239,197
2012	44,015	94,345	109,123	19,310	266,793
2013	44,350	86,806	107,287	16,249	254,692
2014	55,354	99,482	145,533	14,972	315,341
2015	59,079	114,547	202,167	12,828	388,621
2016	74,599	109,503	158,798	18,343	361,243
2017	80,252	135,834	153,644	15,282	385,012
2018	90,388	155,025	148,664	15,164	409,241
2019	90,544	144,985	119,453	18,241	373,223
2020	110,273	144,489	123,597	19,522	397,881
2021	128,762	142,247	100,829	35,430	407,268

Sumber : Comtradeplus.un.org

Ekspor kakao olahan saat ini sedang dalam tahapan atau progress yang baik. Progress tersebut didapatkan dari pabrik-pabrik pengolahan yang semakin berkembang dalam kapasitas kemampuan produksinya. Semuanya berkat pemerintah yang mencanangkan agar Indonesia beralih dari negara yang mengekspor biji kakao menjadi negara yang mengekspor kakao olahan karena secara teritorial Indonesia merupakan negara penghasil kakao.

Oleh sebab itu alangkah baiknya jika Indonesia memanfaatkan potensi besar yang dimilikinya untuk menjadi negara yang lebih besar dalam menguasai perdagangan kakao dunia dan berpotensi mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari penjualan kakao hasil olahan yang dapat dikatakan sebagai nilai tambah.

Nilai Tambah Kakao Olahan

Peningkatan volume ekspor kakao olahan yang kian membaik setiap tahunnya menandakan keberhasilan dari penerapan kebijakan BK. Bukti dari keberhasilan penerapan kebijakan BK telah terlihat secara nyata dengan produksi kakao olahan dalam negeri yang meningkat secara bertahap diiringi dengan ekspor kakao olahan yang juga turut meningkat dari tahun ke tahunnya. Terbukti bahwa arus perdagangan kakao telah berubah mulai dari yang sebelumnya gencar mengekspor bahan mentah kakao kini berhasil meminimalisirnya dan menggantikan ekspor

bahan mentah dengan kakao yang sudah diolah.



Sumber : Comtradeplus.un.org

Ekspor kakao olahan dan biji kakao saling bersilangan dimana biji kakao mengalami penurunan yang drastis dari segi ekspornya ke mancanegara sementara kakao olahan yang awalnya berada di titik bawah kini secara perlahan meningkat dengan peningkatan yang cukup besar dari tahun ke tahun.

Indonesia berhasil mendapatkan apa yang diinginkan dengan kebijakan BK, yakni alokasi perdagangan biji kakao yang hampir sepenuhnya kembali ke dalam negeri tidak diekspor lagi ke mancanegara. Terbukti bahwa kebijakan bea keluar menyebabkan penurunan ekspor biji kakao yang signifikan.⁸ Setelah kebijakan bea keluar dirumuskan oleh pemerintah, komoditas kakao seperti baru terlahir kembali karena Indonesia yang terkenal sebagai negara supplier atau pemasok bahan mentah kakao ke negara-negara pengolahan cokelat, kini menjadi negara yang dikenal sebagai penghasil kakao olahan dan ikut bersaing dengan negara-negara pengolahan kakao yang dulunya disuplai oleh Indonesia. Menurut ICCO posisi Indonesia sebagai negara pengolahan kakao berada pada peringkat ke 3 dunia tahun 2021.⁹ Ini

⁸ Makmun Syadullah, "Dampak kebijakan bea keluar terhadap ekspor dan industri pengolahan kakao," *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 6, no. 1 (2012): 53–68.

⁹ Kemenperin, "Kemenperin: Ekspor Lampau USD1 Miliar, Kinerja Industri Pengolahan Kakao Semakin Manis"

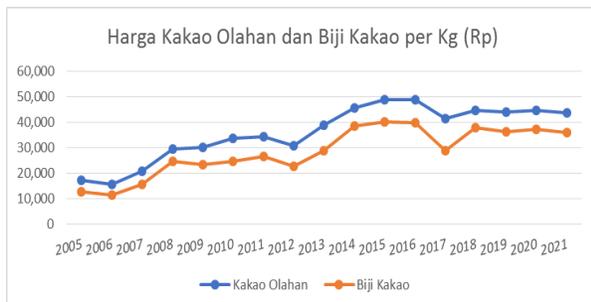
merupakan sinyal yang sangat kuat untuk menandai bahwa Indonesia sudah berhasil mengembangkan hilirisasi produk kakao dalam negerinya hingga bisa mencatat *record* sebagai negara Pengolahan kakao dunia.



Sumber : Comtradeplus.un.org

Pengaruh Hambatan Ekspor Biji Kakao

Pertambahan nilai yang sangat besar dapat dilihat secara nyata dan tidak memerlukan waktu yang lama. Terlihat dalam grafik tersebut hanya butuh waktu 1 tahun kakao olahan sudah berhasil menyalip ekspor biji kakao di tahun 2011. Perbedaan pertumbuhan nilai yang sangat nyata tersebut akan terlihat semakin jelas jika kita bandingkan harga jual antara biji kakao dan kakao olahan dalam bentuk terkecil yakni Kg.



Sumber : Comtradeplus.un.org

Perbandingan harga penjualan biji kakao dan kakao olahan per kilogram dapat

dijadikan acuan bahwa harga kakao olahan memang pasti melebihi atau lebih tinggi dari harga biji kakao. Terlihat dalam grafik tersebut harga ekspor kakao olahan selalu berada diatas harga ekspor biji kakao bahkan sebelum kebijakan BK diberlakukan atau pada saat Indonesia masih mengekspor biji kakao secara masal. Selisih perbedaan harga ekspor kakao olahan dan biji kakao bahkan sempat mencapai Rp. 10.000 per kilogramnya pada tahun 2017. Artinya memang harga kakao yang diolah memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan bahan mentah, jadi langkah yang diterapkan pemerintah dalam menetapkan kebijakan BK untuk mewujudkan nilai tambah dari perdagangan internasional kakao Indonesia merupakan hal yang sangat tepat sekali karena semakin besar produk olahan kakao yang dihasilkan maka pertambahan nilai yang diperoleh akan semakin besar pula. Seperti yang dikatakan Putu Juli Ardika selaku Dirjen Industri Agro, sudah lebih dari 5 tahun terakhir nilai yang didapat dari ekspor produk olahan kakao mencapai 1 miliar dolar lebih.¹⁰

Indonesia memang telah berhasil mengembangkan taraf perkakaoan dalam negerinya dengan meningkatkan hilirisasi serta memperoleh nilai tambah dari produk olahan yang dihasilkan. Namun meski sudah mendapatkan tujuan dari pembuatan kebijakan BK yakni nilai tambah produk kakao, Indonesia masih berada di tahap awal keberhasilan. Potensi Indonesia sebagai negara yang membudidayakan kakao dan mengolah kakao mentah menjadi kakao jadi masih bisa diulik lagi dengan terus meningkatkan hilirisasi dan tentunya memperluas lahan pembudidayaan kakao agar bahan baku yang dimiliki semakin bertambah. Dengan demikian, perolehan nilai tambah dari

<https://kemenperin.go.id/artikel/23699/Kemenperin:-Ekspor-Lampau-USD1-Miliar,-Kinerja-Industri-Pengolahan-Kakao-Semakin-Manis-> diakses pada 03/09/2023 pukul 20:05 WIB.

¹⁰ Kemenperin, "Manisnya Hilirisasi Kakao, Indonesia Jadi Pemasok Rantai Global" <https://kemenperin.go.id/artikel/24268/Manisnya-Hilirisasi-Kakao,-Indonesia-Jadi-Pemasok-Rantai-Global> diakses pada 13/10/2023 pukul 12:16 WIB.

penjualan produk kakao dalam negeri dapat ditingkatkan secara maksimal.

Putu Juli Ardika juga mengungkapkan bahwa peluang bagi Indonesia dalam mengembangkan industri pengolahan kakao masih sangat terbuka luas.¹¹ Produksi kakao olahan masih harus terus ditingkatkan lagi karena pada saat ini Indonesia yang sudah menjadi negara pengolahan kakao masih mengimpor kakao olahan dari luar negeri. Maka dari itu, agar impor kakao olahan dari luar dapat ditekan Indonesia harus meningkatkan produksi kakao olahan dalam negerinya. Apalagi sebagai negara yang menduduki peringkat ke 3 dalam industri pengolahan kakao, Indonesia baru menyuplai produk olahannya sebanyak 9,17% di pasar global.¹² Indonesia harus terus mengembangkan hilirisasi nya agar kontribusinya terhadap perkakaoan dunia terus meningkat dan bisa menguasai pasar kakao global.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari penelitian mengenai kebijakan RI yang mengatur tentang hambatan ekspor biji kakao dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut berhasil memberikan dampak yang baik bagi produksi kakao olahan dalam negeri karena alokasi biji kakao yang dulunya diekspor kini menjadi *stock* hilirisasi karena ketentuan pajak yang diberlakukan dalam kebijakan biji kakao yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 67/PMK.011/2010. Dalam kebijakan tersebut

terdapat ketentuan pajak ekspor untuk biji kakao senilai 0-15% tergantung harga referensi kakao internasional. Hal tersebut menyebabkan ekspor biji kakao terhenti dan biji kakao kemudian dijual ke pelaku industri dalam negeri karena pajak terhitung besar sehingga para pelaku ekspor akan merugi jika tetap melakukan ekspor biji kakao. Tujuan yang sebenarnya dari penetapan kebijakan tersebut adalah perolehan nilai tambah dari produk kakao yang diekspor. Program hilirisasi yang dimaksudkan pemerintah ialah bertujuan agar ekspor kakao Indonesia tidak melulu bahan mentah berupa biji tapi produk olahan yang bernilai lebih tinggi yang akan memberikan sumbangan devisa yang lebih sehingga menghasilkan nilai tambah.

Penerapan dari kebijakan tersebut perlahan-lahan memberikan hasil yang baik bagi perkembangan perkakaoan Indonesia. Dimulai dari alokasi biji kakao yang semula diekspor kini dijual ke perusahaan pengolahan kakao dalam negeri, perkembangan yang terjadi terhadap perusahaan hilirisasi kakao, produksi kakao olahan yang semakin meningkat dan ekspor kakao olahan yang terus memberikan hasil yang memuaskan.

Perolehan nilai tambah yang diharapkan oleh pemerintah terhadap ekspor kakao olahan pun tercapai dengan semakin meningkatnya produk kakao olahan yang diekspor setiap tahunnya semenjak kebijakan BK diberlakukan. Hingga saat ini Indonesia terkenal sebagai negara pengolahan kakao nomor 3 di dunia berkat upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengubah arus perdagangan internasional kakao Indonesia.

Selain dampak positif yang diberikan dengan perolehan nilai tambah yang didapatkan dari ekspor kakao olahan, kebijakan BK memberikan dampak positif lain berupa terbukanya lapangan pekerjaan baru dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan pengolahan kakao dalam negeri yang menyebabkan tidak hanya negara yang

¹¹ Republika, "Kemenperin Ingin Tingkatkan Ekspor Produk Olahan Kakao" <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s13szw457/kemenperin-ingin-tingkatkan-ekspor-produk-olahan-kakao> diakses pada 13/10/2023 pukul 12:46 WIB.

¹² Kemenperin, "Cokelat Artisan Jadi Fokus Pengembangan Industri Pengolahan Kakao" <https://www.kemenperin.go.id/artikel/24326/Cokelat-Artisan-Jadi-Fokus-Pengembangan-Industri-Pengolahan-Kakao> diakses pada 13/10/2023 pukul 12:54 WIB.

sejahtera namun rakyat pun ikut merasakan perubahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Kemenkeu, “*Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar*”

<http://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/67~PMK.011~2010Per.htm>

Diakses pada 20/07/2020 pukul 04:34 WIB.

Zulfiandri, “Analisis Situasi Industri Hilir Kakao Pasca Pengenaan Pajak Ekspor Kakao Sepanjang Tahun 2013-2017,” *Jurnal Inovisi* 14, no. 2 (2018): 81–92.

Putri Iarasati, “*Merkantilisme dalam Ekonomi Politik Internasional*”

[https://www.academia.edu/36788697/Merkantilisme dalam Ekonomi Politik Internasional](https://www.academia.edu/36788697/Merkantilisme_dalam_Ekonomi_Politik_Internasional) diakses pada

7/12/2023 pukul 7:43 WIB.

Kemenkeu, “*Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor*”

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/55TAHUN2008PP.htm> diakses

pada 30/03/2023 pukul 17:10 WIB.

Rudi Hermawan, “Analisis pengaruh kebijakan bea keluar biji kakao, impor biji kakao, ekspor biji kakao dan harga cocoa butter terhadap ekspor cocoa butter,” *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4.3 (2019), 233–42 .

Sebastian Hadinata dan Maria Merry Marianti, “Analisis Dampak Hilirisasi Industri Kakao di Indonesia,” *Jurnal Akuntansi Maranatha* 12, no. 1 (2020): 99–108.

Media Industri, 2013. *Genjot Industri Pengolahan Kakao*. no 2, 2013.

Makmun Syadullah, “Dampak kebijakan bea keluar terhadap ekspor dan industri pengolahan kakao,” *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 6, no. 1 (2012): 53–68.

Kemenperin, “*Kemenperin: Ekspor Lampau USD1 Miliar, Kinerja Industri Pengolahan Kakao Semakin Manis*”

[https://kemenperin.go.id/artikel/23699/Kemenperin:-Ekspor-Lampau-USD1-Miliar,-Kinerja-Industri-](https://kemenperin.go.id/artikel/23699/Kemenperin:-Ekspor-Lampau-USD1-Miliar,-Kinerja-Industri-Pengolahan-Kakao-Semakin-Manis)

[Pengolahan-Kakao-Semakin-Manis-](https://kemenperin.go.id/artikel/23699/Kemenperin:-Ekspor-Lampau-USD1-Miliar,-Kinerja-Industri-Pengolahan-Kakao-Semakin-Manis)

[diakses pada 03/09/2023 pukul 20:05 wib.](https://kemenperin.go.id/artikel/23699/Kemenperin:-Ekspor-Lampau-USD1-Miliar,-Kinerja-Industri-Pengolahan-Kakao-Semakin-Manis)

Kemenperin, “*Manisnya Hilirisasi Kakao, Indonesia Jadi Pemasok Rantai Global*”

[https://kemenperin.go.id/artikel/24268/Manisnya-Hilirisasi-Kakao,-](https://kemenperin.go.id/artikel/24268/Manisnya-Hilirisasi-Kakao,-Indonesia-Jadi-Pemasok-Rantai-Global)

[Indonesia-Jadi-Pemasok-Rantai-](https://kemenperin.go.id/artikel/24268/Manisnya-Hilirisasi-Kakao,-Indonesia-Jadi-Pemasok-Rantai-Global)

[Global](https://kemenperin.go.id/artikel/24268/Manisnya-Hilirisasi-Kakao,-Indonesia-Jadi-Pemasok-Rantai-Global) diakses pada 13/10/2023 pukul 12:16 WIB.

Republika, “*Kemenperin Ingin Tingkatkan Ekspor Produk Olahan Kakao*”

[https://ekonomi.republika.co.id/berita/s13szw457/kemenperin-ingin-](https://ekonomi.republika.co.id/berita/s13szw457/kemenperin-ingin-tingkatkan-ekspor-produk-olahan-kakao)

[tingkatkan-ekspor-produk-olahan-](https://ekonomi.republika.co.id/berita/s13szw457/kemenperin-ingin-tingkatkan-ekspor-produk-olahan-kakao)

[kakao](https://ekonomi.republika.co.id/berita/s13szw457/kemenperin-ingin-tingkatkan-ekspor-produk-olahan-kakao) diakses pada 13/10/2023 pukul 12:46 WIB.

Kemenperin, “*Cokelat Artisan Jadi Fokus Pengembangan Industri Pengolahan Kakao*”

[https://www.kemenperin.go.id/artikel/24326/Cokelat-Artisan-Jadi-Fokus-](https://www.kemenperin.go.id/artikel/24326/Cokelat-Artisan-Jadi-Fokus-Pengembangan-Industri-Pengolahan-Kakao)

[Pengembangan-Industri-Pengolahan-](https://www.kemenperin.go.id/artikel/24326/Cokelat-Artisan-Jadi-Fokus-Pengembangan-Industri-Pengolahan-Kakao)

[Kakao](https://www.kemenperin.go.id/artikel/24326/Cokelat-Artisan-Jadi-Fokus-Pengembangan-Industri-Pengolahan-Kakao) diakses pada 13/10/2023 pukul 12:54 WIB.